

Interaksi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Tri Wahyu Yuliani¹, Mujib^{2*}, Mery Lestari³

¹ Kebijakan dan Manajemen Pajak, Politeknik GUSDURian

² Administrasi Pemerintahan Daerah, Politeknik GUSDURian

³ Teknik Mesin, Politeknik Negeri Pontianak

E-mail Correspondence: mujib@polnep.ac.id

Abstract

This research was conducted to find out how fiscal and monetary policy interacts with economic growth in Indonesia. This research method uses a qualitative approach and secondary data sourced from various literature related to the same problem. The data collection method used in this research is through literature study with the final results in written form. The dependent variable used in this research is economic growth. Meanwhile, the independent variable consists of the fiscal policy side, namely taxes and government spending. Independent variables from the monetary policy side are exchange rate, interest rate, money supply and inflation. Based on the literature studies that have been analyzed, the interaction of fiscal policy on economic growth is shown through that tax revenues and government expenditure have a significant positive relationship with economic growth, namely when there is an increase in tax revenues and government expenditure, economic growth will increase. The interaction of monetary policy is shown by the variables exchange rate, interest rate, money supply and inflation. Based on the literature studies that have been analyzed, interest rates, exchange rates and inflation have a significant negative influence on economic growth in Indonesia. Meanwhile, the interaction between the money supply variable and economic growth is significantly positive, meaning that the greater the money supply, the greater the economic growth in Indonesia.

Keywords: *Economic Growth, Fiscal Policy, Monetary Policy*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana interaksi kebijakan fiskal dan moneter dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang sama. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Variabel dependen yang digunakan

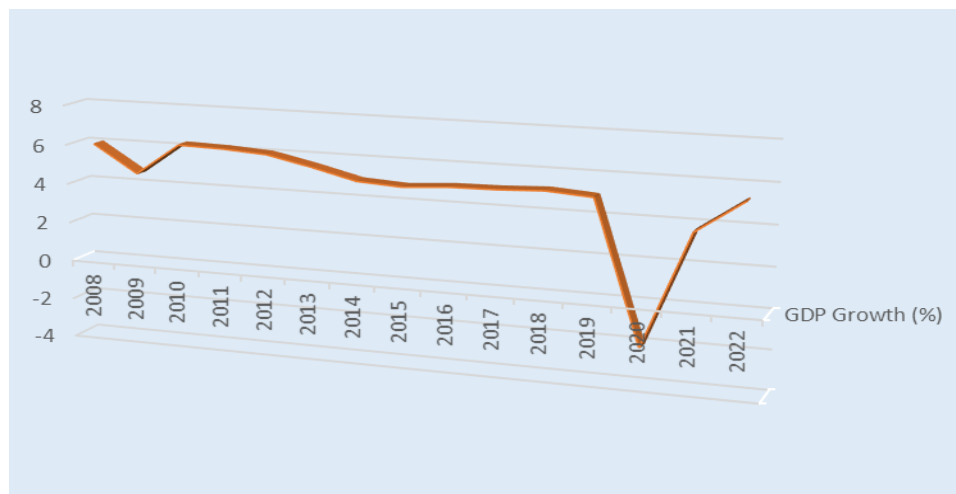
dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel independen terdiri dari sisi kebijakan fiskal yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Variabel independen dari sisi kebijakan moneter yaitu nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar dan inflasi. Berdasarkan studi literatur yang telah dianalisis, interaksi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu ketika terjadi kenaikan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Interaksi kebijakan moneter ditunjukkan oleh variabel nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan inflasi. Berdasarkan studi literatur yang telah dianalisis, suku bunga, nilai tukar dan inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan interaksi variabel jumlah uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan, artinya bahwa semakin banyak jumlah uang beredar maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat.

Kata kunci : : *Kebijakan fiskal, Kebijakan moneter, Pertumbuhan ekonomi*

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara dinyatakan bertumbuh apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa. Kondisi ekonomi suatu negara yang tumbuh merupakan tujuan suatu bangsa. Ketika ekonomi Indonesia tumbuh secara berkelanjutan maka pembangunan nasional dan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia juga meningkat (Sadono, 2008). Pertumbuhan ekonomi negara secara makro diukur menggunakan nilai Gross Domestic Product (GDP) yang merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu (Latumaerissa, 2015).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi jika ditinjau dari pertumbuhan GDP (%) Indonesia selama 15 tahun terakhir (periode 2008-2022), telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Grafik dibawah ini merupakan perkembangan data GDP (%) Indonesia tahun 2008-2022 yang diperoleh dari data World Bank:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan GDP tahun 2008 – 2022 (% , y on y)
Sumber: World Bank (diolah)

Data di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat berdasarkan GDP cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2009 dan 2020. Kondisi GDP suatu negara yang meningkat dari tahun sebelumnya maka negara tersebut mengalami pertumbuhan positif, sebaliknya ketika GDP suatu negara yang menurun dari tahun sebelumnya maka dikatakan negara tersebut mengalami pertumbuhan negatif. Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP Indonesia mengalami fluktuasi. Pertumbuhan GDP pada tahun 2008 dipengaruhi oleh gejolak krisis global tahun 2007 yang telah mengubah perekonomian dunia termasuk Indonesia. Periode 2008, ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 6,1%. Sedangkan periode 2009 bertumbuh sebesar 4,5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan GDP yang menurun ini merupakan dampak krisis keuangan global tahun 2008 yang masih sangat terasa bagi negara Indonesia dimana puncak krisis global terjadi pada kuartal IV tahun 2008 (Bank Indonesia, 2009). Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia terus terjadi pasca tahun 2009 walaupun trend yang cenderung menurun, kecuali tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemic Covid-19. Kontraksi yang terjadi pada periode 2020 sebesar -2,06% dari tahun sebelumnya. Periode 2021, Indonesia mengalami kebangkitan dari pandemic covid-19 ditunjukkan oleh angka GDP yang

mengalami perbaikan dari sebelumnya yaitu tumbuh positif sebesar 3,7% dan tahun 2022 sebesar 5,3% (World Bank, 2022).

Peran Pemerintah sangat penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada dua peran kebijakan pemerintah yang merupakan faktor utama ekonomi makro suatu negara dengan sistem terbuka yakni kebijakan fiskal serta moneter. Kebijakan tersebut dapat menjadi faktor pendorong bertumbuhnya ekonomi serta menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara melalui variabel ekonomi (Srithilat dkk, 2017). Artinya setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sangat mempengaruhi perekonomian sebuah negara baik langsung ataupun tidak. Namun, pengaruh kebijakan moneter dan fiskal ini secara umum bergantung pada pemilihan instrument yang dipilih dalam merumuskan kebijakan fiskal maupun moneter serta pengimplementasiannya di dalam kegiatan ekonomi makro suatu negara.

Menurut Cioran (2014), kondisi keuangan negara lain sangat mempengaruhi pemerintah dalam penentuan kebijakan fiskal dan moneter apa yang akan di ambil oleh sebuah negara dalam era globalisasi saat ini. Seperti sekarang ini, dunia semakin terasa sempit, tidak lagi mengenal atasan ruang dan waktu akibat arus globalisasi. Semua hal dapat cepat sampai suatu tempat yang lain yang lain dengan bantuan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bergantung oleh kondisi ekonomi negara itu, tetapi melibatkan kondisi perekonomian negara lain, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya melihat dari sisi internal negaranya saja tetapi juga melihat keadaan eksternal atau keadaan diluar wilayah negara tersebut.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mampu menghindari dari suatu permasalahan ekonomi di suatu negara serta dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini tidak dapat dipisahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable. Dalam penetapan dan pencapaian defisit fiskal dan target moneter secara konsisten untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mapan serta berkelanjutan tersebut memerlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter. Melalui perbaduan

kombinasi kebijakan fiskal dan moneter akan merubah kesejahteraan warga negara kearah yang lebih baik secara optimal.

Kementerian Keuangan merupakan Kementerian Republik Indonesia yang berperan sebagai pengendali kebijakan fiskal di Indonesia. Salah satu upaya untuk menekan fluktuasi siklus perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui sisi ketenagakerjaan yang tinggi agar dapat menekan laju inflasi yang fluktuatif melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) dan proses pembentukan system perpajakan yang ada di Indonesia. Variabel terkait kebijakan fiskal dalam riset ini yakni penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah.

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan makro yang sangat penting mempengaruhi perekonomian suatu negara. Otoritas yang berwenang dalam bidang moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia yang bertugas dalam mengatur peredaran uang, mengatur nilai suku bunga, serta mengatur nilai tukar mata uang. Ketiga instrumen tersebut berdampak langsung pada kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan moneter akan berhasil jika kebijakan tersebut membawa dampak positif terhadap variable ekonomi makro. Variabel terkait kebijakan moneter dalam riset ini yakni Suku Bunga, Nilai Tukar Mata Uang, Jumlah Uang Beredar (JUB), serta Inflasi.

METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana interaksi kebijakan fiskal dan moneter yang ditetapkan pemerintah kaitannya dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Metode dalam riset ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, dengan mengutamakan proses pengamatan serta mendalami substansi dari hasil pengamatan tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan metode riset menciptakan perkataan baik lisan maupun tulisan dari subjek individu atau pelaku yang kita dikaji (Bog dan Taylor dalam Moleong, 2010).

Riset ini memanfaatkan data sekunder berupa hasil laporan yang dirilis BPS, Bank Dunia, Bank Indonesia, serta beberapa jurnal serta artikel lainnya. Proses pengumpulan data yang dimanfaatkan pada riset ini dengan melakukan kajian

pustaka yang hasil akhirnya berbentuk tulisan. Terdapat enam indikator dalam riset ini yakni pertumbuhan ekonomi, Kebijakan Fiskal (Pajak dan Pengeluaran Pemerintah), dan Kebijakan Moneter (nilai tukar, suku bunga, uang beredar serta inflasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Kebijakan Fiskal

1. Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeskripsikan pajak adalah salah satu bentuk dari dukungan atau kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh perorangan maupun badan usaha yang sifatnya memaksa serta diatur UU dan manfaat pajak tersebut dapat dirasakan tidak langsung untuk mendukung kepentingan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebuah negara memanfaatkan penerimaan pajaknya sebagai unsur pendukung anggaran pendapatan. Pajak merupakan unsur terbesar dan potensial dalam mendukung kegiatan perekonomian sebuah negara. Dewi dan Merkusiwati (2017) menjelaskan pajak adalah sumber penting sebagai penunjang anggaran pendapatan negara. Misi pembangunan perekonomian suatu negara dapat berjalan lancar karena proporsi penerimaan anggaran berupa pajak.

Semua pemasukan pajak dari dalam maupun dari perdagangan internasional adalah komponen dalam pemasukan pajak. Sumber pemasukan pajak ini menjadi sumber pendanaan pengeluaran belanja bagi pemerintah atas pembayaran pajak yang diterima oleh negara. Pemasukan pajak yang didapatkan oleh pemerintah berasal dari pembayaran pajak masyarakat. Menurut Kementerian Keuangan (2007), penerimaan pajak ini pajak berasal dari PPH, PPN, PBB, PPnBM, bea perolehan atas tanah dan bangunan, serta cukai.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (2023) pertumbuhan pajak pada awal tahun 2023 sangat baik. Pencapaian sector penerimaan pajak bulan januari pada tahun 2023 ini sekitar Rp162,23 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 48,6% *year on year*. Hal ini dipengaruhi oleh

penerapan UU HPP, selain itu juga karena peningkatan aktifitas ekonomi pada akhir tahun 2022 dan tahun baru 2023 yaitu libur natal dan tahun baru.

Penerimaan pajak sampai akhir Juli 2023 juga masih terpantau mengalami pertumbuhan positif (Kementerian Keuangan, 2023). Pencapaian penerimaan pajak bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp1.109,1 triliun dan tumbuh sebesar 7,8% (yoy). Pencapaian tersebut terdiri dari Rp 636,56 triliun berasal dari PPh Non Migas, Rp 417,64 triliun berasal dari PPN dan PPnBM, Rp9,60 triliun berasal dari PBB dan pajak lainnya, Rp45,31 triliun dari PPh Migas, dan Rp149,83 triliun berasal dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Sihaloho (2020) mengatakan bahwa dalam melakukan pertahanan dan penguatan kemampuan negara dalam persaingan tingkat global sangat memerlukan kebijakan pajak yang tepat. Penerimaan pajak menjadi modal sumber dalam peningkatan perekonomian di Indonesia melalui belanja pembangunan. Faktor terbesar yang sangat mempengaruhi pendapatan negara selain dari non pajak (migas dan nonmigas) adalah Pajak. Dimana komposisi pendapatan negara sekitar 75% berasal dari pajak. Sumaryani (2019) menjelaskan pajak merupakan komponen sangat penting di dalam APBN sebagai pendapatan negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka akan meningkatkan pengeluaran belanja pemerintah hal ini akan memicu perekonomian menuju ekonomi yang bertumbuh dengan optimal.

Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Perwira (2019) menjelaskan bahwa peningkatan pajak mempengaruhi peningkatan pengeluaran belanja negara, tingkat investasi, sumber pendanaan pembangunan daerah yang dapat memperluas lapangan pekerjaan. Adanya peningkatan penerimaan pajak berfungsi dalam menjaga kestabilan tingkat inflasi dalam mengatur jumlah uang beredar karena pemungutan pajak tersebut sehingga pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian Syahputra (2017), penerimaan pajak memiliki hubungan positif signifikan yaitu ketika penerimaan pajak meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga meningkat. Hasil koefisien regresi yang dihasilkan melalui metode OLS adalah sebesar 0,136. Apabila

penerimaan pajak meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,136 % (asumsi ceteris paribus).

Berbagai penelitian yang mendukung hal itu juga dilakukan oleh para akademisi mengingat pentingnya peran pajak bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menghasilkan dampak positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain oleh Adriansyah (2014), Adkisson dan Mohammed (2014), Jalata (2014), dan Stoilova (2017).

Pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi di negara negara Amerika Latin (Canavire-Bacarreza et al, 2013). Penelitian ini menggunakan model vektor autoregresif (VAR) dan menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan pribadi dan pendapatan perusahaan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan di negara-negara Amerika Latin, namun tidak ada bukti hubungan tersebut di negara berkembang dan maju. Babatunde, dkk. (2017) melakukan penelitian untuk menguji hubungan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi di Afrika pada tahun 2004 hingga 2013. Uji estimasi dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji unit *root* yang menunjukkan bahwa variabel PDB dan perpajakan normal dan stabil. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak berhubungan positif dengan PDB dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Afrika.

2. Pengeluaran Pemerintah

Ketidakmampuan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi maka pemerintah mengambil langkah melalui kebijakan fiskal. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah adalah berupa pengeluaran negara. Belanja negara adalah suatu komponen pemerintah yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Mankiw, 2014).

Tujuan dari kebijakan fiskal tidak hanya sebagai langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan redistribusi pendapatan dan pemerataan. Studi terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara harus tetap dilakuka karena melalui studi ini kita dapat melihat sejauh mana keefektifan kebijakan fiskal ini dalam

mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Studi mengenai efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lainnya di telah banyak dikaji peneliti. Penelitian dilakukan oleh Alexiou (2009), Srinivasan (2013), Muhammed (2014), Olulu, dkk (2014), Abdullah & Rusdarti (2017) mengkaji mengenai efek dari pengeluaran pemerintah di berbagai negara berkembang seperti India, Nigeria, Ethiopia, Malaysia, Indonesia dan negara maju di Eropa yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan di berbagai negara. Penelitian dari Gray dan Cheryl (2007) tentang pengaruh anggaran belanja dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah belanja negara dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Al-Shatti (2014) dan Shivaranjani (2010) bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal demikian mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur diperlukan dalam mendukung proses pembangunan daerah/negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Kebijakan Moneter.

1. Suku Bunga

Salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara yang terus diamati dan dicermati adalah suku bunga. Perubahan suku bunga yang mengalami perubahan akan berdampak terhadap kegiatan masyarakat dan perubahan keadaan ekonomi suatu negara. Suku bunga merupakan sesuatu yang dikorbankan oleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk membelanjakan uang yang mereka punya (Ogundipe et al., 2020). Suku bunga adalah suatu tingkat harga yang wajib ditunaikan kepada kreditur (Myshkin dalam Susilawati, 2019). Mahendra mengatakan bahwa suku bunga adalah suatu tingkat harga yang harus ditunaikan pada sebuah transaksi penukaran uang dengan kuantitas sama pada kurun waktu tertentu (Ningsih dan Kristiyanti, 2019).

Perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi dan mengancam dunia bisnis dalam pembayaran biaya serta hutang bisnis yang mereka tanggung. Perubahan kenaikan suku bunga ini akan berdampak secara langsung bagi pembisnis antara lain menurunkan keuntungan yang mereka dapat dan menambah beban bisnis yang mereka jalankan. Hal ini menjadikan variable suku bunga menjadi perhatian penting karena faktor yang berpengaruh bagi ekonomi sebuah negara. Dampak perubahan suku bunga terhadap perekonomian dapat dilihat dari bertumbuh tidaknya ekonomi sebuah negara. Fluktuatifnya tingkat suku bunga acuan akan berdampak bagi kondisi perekonomian suatu negara, ketika suku bunga acuan meningkat akan memicu disinsentif bagi penyaluran kredit serta berdampak pada investasi riil akibatnya masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk memilih menabung di bank, begitu pula sebaliknya. Dampak lain yang terjadi adalah tingkat konsumsi masyarakat juga melemah sebagai dampak perubahan suku bunga pinjaman yang meningkat. Kondisi seperti ini sangat berdampak pada perekonomian sebuah negara karena penurunan investasi dan konsumsi ini secara langsung akan menurunkan nilai PDB negara tersebut yang mana perhitungan PDB suatu negara di dalamnya terdapat variable investasi dan konsumsi.

Tingkat suku bunga merupakan instrumen dalam kebijakan moneter. Variabel suku bunga berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi (Ningsih et al., 2023). Menurut penelitian Hatmanu, et al. (2020), Low & Chan (2017) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berdampak negatif terhadap perekonomian. Suku bunga yang rendah membantu perekonomian tumbuh karena masyarakat dapat memperoleh lebih banyak uang untuk melakukan pembelian dan berinvestasi dalam bisnis, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Suatu negara tidak dapat tumbuh jika biaya pinjaman sangat tinggi dan hal ini berpengaruh terhadap suku bunga.

Tingkat suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi laju pembangunan ekonomi. Ketika pengangguran tinggi, Bank Sentral biasanya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga rendah, sehingga masyarakat menganggap aksesibilitas dana berbunga rendah sebagai insentif untuk berinvestasi dalam bisnis, sehingga meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia dan

mengurangi pengangguran. Ketika tingkat pengangguran rendah, Bank Sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk mencegah inflasi. Penurunan suku bunga adalah kunci untuk meningkatkan dunia usaha dan hal ini secara positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Nilai Tukar

Salah satu faktor yang terpenting dalam perekonomian terbuka adalah nilai tukar atau kurs. Nilai tukar mempunyai dampak yang sangat besar dalam variabel-variabel makroekonomi dan neraca transaksi berjalan. Menurut Krugman (2005), Nilai tukar merupakan harga dari suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, selain itu juga nilai tukar ini dianggap suatu harga dari suatu aktiva (harga).

Setiap negara harus memperhitungkan nilai tukar mata uangnya dengan mata uang negara lain agar mempermudah melakukan transaksi internasional antar negara. Penentuan nilai tukar menjadi sangat penting ketika suatu negara akan membeli barang kepada negara lain dimana setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Misalnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat akan melakukan transaksi ekonomi, Indonesia harus membeli dollar untuk membeli barang atau melakukan kegiatan ekonomi di Amerika Serikat, dan juga sebaliknya. Dengan kata lain keputusan pembelajaan akan tergantung oleh nilai tukar tersebut. Menurut Krugman & Obstfeld (1999) nilai tukar atau kurs memungkinkan suatu negara menerjemahkan harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.

Perkembangan nilai tukar rupiah saat ini terpantau stabil walaupun keadaan perekonomian dunia saat ini sedang tidak menentu. Menurut laporan yang dirilis Bank Indonesia (2023), pergerakan nilai tukar rupiah terpantau menguat 3,63% ptp dari level akhir Desember 2022. Level nilai tukar rupiah Indonesia sekarang ini lebih kuat jika dibandingkan dengan apresiasi Peso Filipina, Baht Thailand, dan Rupee India yaitu masing-masing berada sebesar 1,78%, 0,42%, dan 1,11%. Bank Indonesia memperkirakan keedepan nilai tukar rupiah Indonesia akan menguat dengan seiring meredanya kondisi ketidakpastian pasar keuangan global dan didukung oleh kemajuan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, tingkat inflasi

yang rendah, dampak dari hasil asset keuangan domestik yang menarik dan hasil positif dari diterapkannya PP 36/2023 tentang DHE SDA. Bank sentral juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran level di atas 4,5% sampai dengan 5,3%.

Kondisi nilai tukar rupiah yang sedang mengalami depresiasi dimana dollar terapresiasi akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sunariyah (2006), naik turunnya suatu perekonomian Indonesia dapat dilihat dari pergerakan nilai mata uang rupiah. Keadaan perekonomian Indonesia yang sedang lesu terjadi sering dengan kondisi nilai mata uang rupiah terhadap dollar yang terdepresiasi. Hal ini karena factor penting dalam perekonomian Indonesia sedang tidak kuat sehingga menyebabkan terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Harga relatif dolar menjadi naik sedangkan harga relatif rupiah menjadi turun akibat dari terapresiasi nilai dollar AS sehingga nilai rupiah menjadi tertekan. Peristiwa ini dapat memicu investor asing menarik investasinya yang ada di Indonesia dan tentunya hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi sebaliknya ketika nilai tukar rupiah yang sedang mengalami apresiasi dimana dollar terdepresiasi akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang menguat akan menarik para investor asing untuk menginvestasikan dananya ke dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penambahan aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

Penelitian tersebut juga didukung oleh temuan Pridayanti (2014), variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode OLS dimana hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002-2012 dengan nilai signifikansi -0,0441. Artinya bahwa variabel nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding terbalik, dimana ketika nilai tukar meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya ketika nilai tukar menurun maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian oleh Lastri & Anis (2020) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan data tahun 2011-2018 dengan metode OLS dan ECM. Hasil nilai koefisien dari regresi OLS sebesar 0.000384 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hal itu berarti ketika terjadi perubahan nilai tukar sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0.000384% (asumsi *ceteris paribus*).

Dari berbagai penelitian dan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor luar negeri. Nilai tukar ini merupakan faktor penentu kegiatan transaksi keuangan internasional yang dilakukan antarnegara satu dengan lainnya yang terlibat dalam perdagangan luar negeri tersebut. Dalam jangka panjang nilai tukar rupiah yang terapresiasi maupun terdepresiasi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu negara.

3. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara pada periode waktu tertentu disebut jumlah uang beredar (Ritonga, 2003). Definisi lain mengenai jumlah uang beredar adalah *the total quantity of money in the economy* (Hubbard,dkk. 2005). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai jumlah dari keseluruhan uang yang ada di perekonomian suatu negara.

Dalam arti luas uang beredar dapat dinyatakan dengan M2 dan dalam arti sempit disebut dengan M1. Uang kartal dan uang giral ini merupakan kategori M1. M2 meliputi M1, uang kuasi, surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan waktu hingga satu tahun.

Kondisi terkini bulan Juli 2023 uang beredar M2 di Indonesia telah mengalami peningkatan. Tercatat menurut laporan BI (2023), pertumbuhan M2 pada bulan Juli 2023 mencapai 6,4% (yoy) yaitu sebesar Rp8.350,5 triliun, lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Juni 2023 sebesar 6,1% (yoy). Peningkatan M2 ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah uang kuasi yang mencapai angka 9,4% (yoy).

Seiring peningkatan pertumbuhan M2 ini juga dibarengi oleh peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 8,5% pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juni 2023 yaitu 7,8% (yoy) (Bank Indonesia, 2023). Selain itu, aktiva luar negeri bersih meningkat sebesar 9% (yoy) pada bulan Juli 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan lalu hanya sekitar 3,1% (yoy). Disisi lain, tagihan bersih Pemerintah Pusat pada Juli 2023 mengalami kontraksi sebesar 12,1% (yoy), setelah bulan Juni 2023 tumbuh sekitar 1,7% (yoy).

Pengaturan jumlah uang beredar yang menjadi salah satu instrument kebijakan moneter mampu berpengaruh kepada variabel-variabel makro secara kompleks dan dampak yang besar terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Penetapan dan pengaturan kebijakan moneter inilah harus tepat dalam menghadapi masalah ekonomi yang kompleks yang ada di perekonomian negara tersebut.

Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sedang naik atau turun bisa dilihat dari jumlah uang yang beredar. Uang mempunyai dampak positif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah uang beredar meningkat maka BI sebagai badan pengawas peredaran uang di Indonesia akan menurunkan interest rate (suku bunga). Suku bunga yang menurun ini dapat meningkatkan investasi karena suku bunga yang rendah mendorong para investor untuk berinvestasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosephina & Murtala (2019) menjelaskan variable jumlah uang beredar mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Asnawi & Fitria (2018) menjelaskan bahwa variable jumlah uang beredar mempunyai dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya bahwa ketika jumlah uang beredar meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Ketika jumlah uang beredar meningkat di perekonomian maka masyarakat dapat menggunakan sebagian uang yang mereka miliki untuk keperluan konsumsi sehingga peristiwa ini berpengaruh terhadap kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi kemudian permintaan akan faktor produksi juga akan bertambah. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa dan Tenda (2016), variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan investasi. Investasi meningkat dapat memicu peluang bisnis dan peluang kerja bagi masyarakat yang kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

4. Inflasi

Inflasi merupakan kondisi yang memperlihatkan ada kecenderungan terjadi kenaikan harga dan jasa pada jangka panjang dalam suatu perekonomian negara (BPS, 2023). Penyebab inflasi tersebut akibat perbedaan antara arus uang dan barang di perekonomian suatu negara. Menurut Simanungkalit (2020) kenaikan satu atau dua jenis barang bukan disebut inflasi melainkan jika kenaikan barang tersebut terjadi secara keseluruhan dan menyebar pada barang lainnya. Index Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator pengukuran besarnya inflasi yang terjadi di sebuah negara. Menurut Simanungkalit (2020) jika tingkat inflasi yang berada pada level dibawah 10% atau masih tergolong rendah tidak membawa dampak yang negatif pada perekonomian suatu negara. Dimana tingkat kenaikan harga secara umum mendorong pengusaha untuk menambah produksinya.

Perkembangan inflasi di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2022 mengalami perubahan atau berfluktuatif. Menurut data yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan bank Indonesia, tingkat inflasi pada tahun 2000 sebesar 9,4%, pada tahun 2001 sebesar 12,56%, tahun 2002 sebesar 10,52%, tahun 2003 sebesar 5,16%, pada tahun 2004 yaitu 6,4%, lalu pada tahun 2005 sebesar 17,10%, lalu tahun 2006 sebesar 6,6%, sedangkan tahun 2007 sebesar 6,59%, tahun 2008 sebesar 11,06 persen, lalu pada tahun 2009 2,78 persen, lalu pada tahun 2010 tingkat inflasi yang terjadi sebesar 6,96%, pada tahun 2011 tingkat inflasi sebesar 3,79%, tahun 2012 terjadi kenaikan yaitu menjadi sebesar 4,3%, tahun 2013 meningkat menjadi 8,38%, sedangkan tahun 2014 kembali menurun yaitu menjadi 8,36%, lalu tahun 2015 mengalami perbaikan menjadi 3,35%, semula membaik lagi tahun 2016 sebesar 3,02%, pada tahun 2017 kembali meningkat pada tingkat inflasi sebesar 3,61%, tingkat inflasi tahun 2018 mengalami perbaikan yaitu berada diangka

3,13%, tahun 2019 kembali menurun menjadi 2,72%, tahun 2020 tingkat inflasi terendah dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 1,68%. Penyebab penurunan tingkat inflasi tahun 2020 adalah pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat menurun akibat Pandemi Covid-19, sehingga permintaan barang dan jasa di perekonomian menjadi berkurang dan harga barang jasa sulit naik bahkan cenderung menurun. Tahun 2021 tingkat inflasi mengalami peningkatan sebesar 1,87%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,51%.

Dilihat dari sisi kebijakan moneter tingkat inflasi mempunyai dampak yang kuat pada tingkat konsumsi masyarakat dan investasi pemerintah karena hal ini terkait harga suatu barang dan jasa di perekonomian suatu negara. Menurut Daniel (2018), menjelaskan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah terkait inflasi dapat menjadi boomerang karena inflasi adalah fenomena moneter yang dapat menimbulkan masalah yang serius di suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi.

Fenomena inflasi ini sangat berdampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa penelitian membuktikan bahwa variabel inflasi mempunyai dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mohseni & Jouzaryan (2016) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kenaikan inflasi akan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Tingkat inflasi menyebabkan dampak negatif terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yaitu Afrika dan Amerika Latin (Ericsson dalam Sumaryani, 2019). Penelitian ini menemukan apabila tingkat inflasi dibawah 9% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi dibawah 9% termasuk kategori inflasi ringan sehingga memiicu pengusaha untuk memproduksi barang/jasa lebih banyak dan keuntungan yang didapat juga lebih banyak lagi.

Di Indonesia nilai inflasi terendah yang dicapai yaitu sebesar 1,68% pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 sedang meningkat sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak kepada harga barang jasa yang ditawarkan

sulit untuk naik. Inflasi tahun 2020 tergolong sangat rendah namun bukan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat, hal ini disebabkan tahun tersebut pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan anggaran defisit fiskal. Tujuan kebijakan ini untuk mengatur hutang negara yang meningkat dan agar terhindar dari resiko inflasi di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dianalisis, interaksi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah berdampak terhadap bertumbuhnya perekonomian ketika terjadi kenaikan penerimaan pajak serta pengeluaran pemerintah, sehingga perekonomian juga bertumbuh dan meningkat. Dalam mendukung hasil analisis kebijakan fiskal yang telah dilakukan sebaiknya pemerintah membuat aturan terkait perpajakan di Indonesia menjadi lebih ketat sehingga dapat menambah penerimaan pajak karena pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara. Pengetatan aturan perpajakan diperlukan untuk mendukung transparansi informasi, menjauhi adanya *free rider* serta tindakan-tindakan penggelapan pajak yang akan merugikan negara.

Sumber penerimaan negara berupa pajak dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pemerintah di berbagai pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Maka dari itu perlunya pengawasan dan pemilihan kebijakan yang diharapkan kebijakan yang dipilih akan membawa pengaruh kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia dan tidak merugikan negara melalui penyalahgunaan dana pengeluaran tersebut. Salah satu pengeluaran pemerintah yang dapat mendorong perekonomian daerah di Indonesia adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur potensial dari suatu daerah akan meningkat seiring akan terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari berbagai sumber usaha yang berkembang akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Interaksi kebijakan moneter ditunjukkan oleh tingkat suku bunga bank, nilai tukar mata uang, peredaran uang serta inflasi. Berdasarkan studi literatur yang telah dianalisis, suku bunga, nilai tukar serta inflasi berdampak negatif terhadap

perekonomian di Indonesia. Sedangkan interaksi variabel peredaran uang dengan pertumbuhan ekonomi adalah berdampak positif yang bermakna bahwa peredaran uang yang semakin banyak berdampak terhadap bertumbuhnya ekonomi di Indonesia. Dalam mendukung hasil analisis kebijakan moneter yang telah dilakukan berkaitan dengan suku bunga oleh Bank Sentral yakni Bank Indonesia sebaiknya perlu teliti dalam menetapkan kebijakan suku bunga serta dapat mempertimbangkan penetapan laju inflasi agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai serta ekonomi mengalami peningkatan.

Terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, perlu disikapi oleh pemerintah dengan memberikan solusi yang tepat dan cepat agar perekonomian Indonesia tetap stabil. Kebijakan terkait peredaran uang di Indonesia sebaiknya pemerintah dan BI diharapkan dapat mengontrol dan menyetabilkan peredaran uang di masyarakat tersebut. Pemerintah perlu menambah peredaran uang untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang resesi, misalnya melakukan pembelian surat berharga. Sebaliknya pemerintah mengurangi peredaran uang ketika kondisi perekonomian Indonesia sedang inflasi, misalnya melakukan penjualan surat berharga. Tingginya inflasi berdampak terhadap perekonomian, sehingga perlu dikontrol pemerintah dengan pemilihan kebijakan yang tepat seperti mengupayakan stabilitas terhadap barang dan jasa serta meningkatkan keamanan di dalam negeri agar tercipta kondisi yang baik agar inflasi dapat terkendali dan terkontrol dengan maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M.A., Rusdarti. (2017). The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia and Singapore. *Journal of Economic Education*. 6 (1).
- Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu. (2014). Tax structure and state economic growth during the Great Recession, *The Social Science Journal*, 51(1), 79-89.
- Adriansyah, B. G. (2014). Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 18(1), 69-84.

- Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11(1).
- Al-Shatti, A.S. (2014). The Impact of Public Expenditure on Economic Growth in Jordan. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 10.
- Asnawi, A, & Fitria, Hafizatul. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Vol 7, No 1, 2018.
- Babatunde, O. A., Ibukun, A. O., & Oyeyemi, O. G. (2017). Taxation Revenue and Economic Growth in Africa. *Journal of Accounting and Taxation*, 9, 11-22.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Kebijakan Moneter.
- Canavire-Bacarreza, Gustavo; Martinez-Vazquez, Jorge; Vulovic, Violeta. (2013). *Taxation and economic growth in Latin America, IDB Working Paper Series, No. IDBWP-431*, Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC, <https://hdl.handle.net/11319/458>.
- Cioran, Z. (2014). "Monetary policy, inflation and the causal relation between the inflation rate and some of the macroeconomic variables". *Procedia Economics and Finance*, 16, 391-401.
- Daniel, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 131-136.
- Dewi, T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007.
- Gray, Cheryl. (2007) Fiscal Policy and Economic Growth in Europe and Central Asia: An Overview. In *Fiscal Policy and Economic Growth: Lessons for Eastern Europe and Central Asia*. The World Bank. Washington DC.
- Hatmanu, M., Cautisanu, C., & Ifrim, M. (2020). *The Impact of Interest Rate, Exchange Rate and European Business Climate on Economic Growth in Romania: An ARDL Approach with Structural Breaks*. Sustainability.
- Hubbard, & Dkk. (2005). *Effects Of The Real Exchange Rate On Output And Inflation: Evidence From Turkey*. The Developing Economies. XL-4 December 2003: 401-435.
- Jalata, D. M. (2014). The role of value added tax on economic growth of Ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156-161.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Krugman, Paul R. (2005). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krugman, Paul R and Maurice Obstfeld. (1999). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Lastri, W, A, &, Anis, A. (2020). Pengaruh E-Commerce, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*, 2 (2),
- Latumaerissa, Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Low, YW., dan Chan TH. (2017). Foreign Exchange Rate, Interest Rate, Inflation Rate and Economic Growth in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*. 9 (4s)
- Mankiw, N. Gregory. 2014). *Principles of Economics*, 7th ed. Cengage Learning.
- Mohseni, Mehrnoosh, & Jouzaryan, Feizolah, (2016). Examining the Effects of Inflation and Unemployment on Economic Growth in Iran (1996-2012), *Procedia Economics and Finance*, 36, 381-389.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5, No.9.
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode (2014-2016). *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 20 (2), 96-103.
- Ningsih, L., et al., (2023). Efektivitas Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*. 2 (2), 121-240.
- Ogundipe, Adeyemi A., Akintola, D. A. F., & Olaoye, D. S. A. (2020). Interest Rates and Loan Performance of Deposit Money Banks In Nigeria. *EPRA International Journal of Economic and Business Review*, 8(1).
- Olulu, R.M, Erhieyovwe, E.K, Andrew, U. (2014). Government Expenditures and Economic Growth: The Nigerian Experience. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 5, No 10.
- Perwira, A. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak dalam Negeri, Pembentukan Modal Bruto, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(2), 104-117.
- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2002-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2 (2).
- Ritonga, dkk. (2003). *Pelajaran Ekonomi Jil.2 Untuk SMU Kelas 2*. Jakarta: Erlangga.

- Sadono, Sukirno. (2008). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shivaranjani, V. (2010). *Size and Composition of Government Expenditure in India: Impact on Economic Growth*; Madras School of Economics Anna University.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209.
- Simanungkalit, Erika F. B. (2020). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises*, 13 (3),
- Srinivasan, P. (2013). Causality between Public Expenditure and Economic Growth: The Indian Case. *Journal of Economics and Management*, Vol. 7, No. 2.
- Srithilat, K., Sun, G., & Thavisay, M. (2017). The impact of monetary policy on economic development: Evidence from Lao PDR. *Global Journal of Human-Social Science Research*, 2, 9-15.
- Stoilova, D. (2017). Tax Structure and Economic Growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administración*, 62(3), 1041-1057.
- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 16–27.
- Sunariyah. (2006). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Susilawati, & Putri, D. Z. (2019). Analisis Pengaruh Transaksi Non Tunai Dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 667–678.
- Syahputra, Rinaldi. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, VOL. 1, NO. 2.
- Tiwa, F. R., Rumat, V., & Tenda, A. (2016). Pengaruh Investasi , Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Yosephina, Risky Meri. & Murtala. (2019). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*. 2 (2).
- World Bank. (2022). Indonesia Economic Prospect.